

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo dengan beberapa poin sebagai berikut :

1. Keterlibatan *Stakeholder* dalam kegiatan kolaborasi pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo meliputi 4 aktor *stakeholder* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Kelompok budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pengepul hasil produksi ikan gurame sebagai aktor swasta.
2. Sedangkan dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang terjadi dalam proses pembudidayaan ikan gurame antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa dipengaruhi indikator-indikator berikut yang ditulis oleh teorinya Ansel dan Gash (2007) sebagai berikut : *Starting condition*, *Facilitative leadership*, *Institusional design* dan *Collaborative Proses* sampai

pada tahap Hasil sementara yang diperoleh pada proses kolaborasi dalam pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo sudah adanya peningkatan hasil produksi secara signifikan terutama peningkatan perekonomian anggota kelompok budidaya. Bahkan pada tahun 2019 kerjasama antara 3 *stakeholder* ini akan dilakukan dengan skala yang lebih besar dengan memanfaatkan fasilitas tanah desa dengan cara disewa. Meskipun dalam pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik dan memperoleh hasil yang baik pula, akan tetapi dilihat dari perspektif *Collaborative governance* pelaksanaan kolaborasi ini masih belum sempurna karena belum adanya keterlibatan secara dominan 3 aktor utama kolaborasi yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Karena dalam penelitian yang dilakukan keterlibatan aktor swasta dalam hal ini Pengepul hasil produksi atau Toke yang biasanya membeli hasil produksi petani dalam proses kolaborasi hanya terlibat pada tahap penjualan hasil produksi saja, sedangkan secara keseluruhan keterlibatan pengepul dalam proses kolaborasi masih kurang dilakukan.

4.2 Saran

Ada beberapa hal yang penulis ingin sarankan dalam penelitian ini, terutama pelaksanaan *collaborative governance* dalam proses pembudidayaan ikan gurame antara Dinas Kelautan dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia terutama keterlibatan masyarakat Desa Hargomulyo dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan terkait pelaksanaan pembudidayaan ikan gurame sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan masalah pengangguran di Desa Hargomulyo.
2. Meningkatkan proses kolaborasi dengan melibatkan aktor-aktor penting lain dalam proses kolaborasi seperti halnya Media dan Akademik.
3. Peningkatan peran dan keterlibatan aktor swasta dalam proses kolaborasi, sehingga nantinya selain diharapkan akan mendukung pelaksanaan *collaborative governance* lebih maksimal dilakukan, keterlibatan aktor swasta dalam proses kolaborasi juga dihapkan mampu menciptakan inovasi dibidang pemasaran bukan hanya pemasaran hasil budidaya ikan gurame mentah, tapi lebih ke inovasi pemasaran produk olahan ikan gurame sehingga dilihat dari segi ekonomis akan lebih menguntungkan dan menghasilkan.